

## **PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN DI PERGURUAN TINGGI: SEBAGAI ALTERNATIF PENANGGULANGAN PENGANGGURAN TERDIDIK**

**Eny Wahyu Suryanti**

Dosen Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan  
FKIP Universitas Wisnuwardhana Malang  
*e-mail: enywahyu901@gmail.com*

### ***ABSTRACT***

*Educated unemployment has indeed had a negative impact on education, both in social stability and society. Improving the quality of tertiary education is very necessary in managing and developing tertiary institutions with modern management principles oriented to quality. In realizing the improvement of the quality of education, there are several aspects that must be considered, namely 1) the education system must be routinely evaluated with reference to the development of science, technology and art and global developments in the world community, 2) improving the quality of students including; setting quality standards for student selection, learning discipline, character building, and skills development, 3) improving the quality of lecturers in recruitment, career path, performance, development of science, teaching, research, service, and welfare, 4) Curriculum development based on market needs work, and 5) developing infrastructure to support the education and teaching process.*

**Keywords:** *quality of education, higher education, educated unemployment*

### **PENDAHULUAN**

Bangsa-bangsa di dunia dituntut bersaing secara global di era globalisasi. Bangsa Indonesia merupakan salah bangsa yang merdeka dan memiliki keinginan untuk menjadi bangsa yang bebas, cerdas, maju, dan mandiri (Marliwati, 2016). Persaingan kualitas produk terjadi di era globalisasi yang menyebabkan peminatan konsumen terhadap produk yang bermutu. Chalid (2010) menyebutkan bahwa di era globalisasi, semua perguruan tinggi harus berbasis mutu. Jadi, bagaimana masing-masing perguruan tinggi mampu menunjukkan keunggulan dalam kegiatan jasa pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Para calon ekonom yaitu mahasiswa yang menuntut ilmu di perguruan tinggi memiliki tujuan untuk mendapatkan nilai ganda dari hasil pembelajarannya di laboratorium, meliputi; ilmu pengetahuan, gelar, *skill*, *experience*, dan *attitude* yang baik sebagai bekal untuk menghadapi dunia persaingan global. Hal tersebut diperuntukkan untuk persiapan dalam memasuki dunia kerja agar mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Perihal yang terjadi pada mutu lulusan perguruan tinggi di masa sekarang masih banyak lulusan yang tidak dapat diterima dan mampu bekerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Salah satu penyebab dari merosotnya potensi mutu lulusan di perguruan tinggi yaitu hanya mengedepankan aspek kuantitas; dimana yang diprioritaskan pada pendapatan jumlah mahasiswa yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, otonom

kampus yang diberikan kepada masing perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) diharapkan pengelolaannya mampu memberikan peningkatan terhadap kualitas mutu lulusan masing perguruan tinggi.

Hasil studi Suyanto (2013) menunjukkan bahwa masih banyak para lulusan PT yang belum memiliki kemandirian untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau usaha mandiri. Meskipun mereka merupakan para sarjana yang berasal dari PT yang bergengsi, dan IPKnya diatas 3 bukan menjadi jaminan untuk langsung mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan harapannya. Hal ini disebabkan karena rendahnya kompetensi yang dimiliki oleh para lulusan PT untuk mengikuti persaingan pasar kerja yang sangat kompetitif. Sehingga masih banyak lulusan PT yang harus menjadi pengangguran terlebih dahulu.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kemampuan dalam pengelolaan dan pengembangan perguruan tinggi dengan prinsip-prinsip manajemen modern yang berorientasi pada kualitas lulusan PT. Dalam hal ini, para pengelola PT harus terus menerus melakukan perbaikan pada sistem manajemen mutu, sehingga dapat memperkuat dan mengembangkan mutu lulusan yang mampu memenuhi tuntutan pasar kerja. Penentuan kebijakan-kebijakan yang berwawasan kedepan dibutuhkan kecermatan dalam membuat sebuah analisis *SWOT* sebagai bahan pertimbangan adanya pembaharuan sistem manajemen PT.

Perguruan tinggi merupakan suatu lembaga pendidikan yang memiliki tujuan untuk mendewasakan para calon pemimpin bangsa dan ekonom yang membutuhkan wawasan ilmu pengetahuan serta pengalaman sesuai dengan bidang keilmuan yang telah dipilihnya. Namun, beban tanggung jawab pendidikan tidak hanya pada pemerintah saja, akan tetapi seluruh stakeholder memiliki tanggung jawab yang sama. Oleh sebab itu, manajemen perguruan tinggi yang akuntabel dan transparan perlu ditingkatkan oleh masing-masing lembaga agar peningkatan mutu lulusan bisa terwujud secara maksimal.

Para pakar pendidikan dan pemerintah memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan mutu pendidikan dengan beberapa solusi, yaitu terbitnya UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, UU Badan Hukum Pendidikan Tahun 2008, serta yang lainnya. Menurut Alba (2011), secara esensial telah ditegaskan tentang tujuan pendidikan oleh sistem pendidikan nasional bahwa agar peserta didik menjadi manusia yang memiliki kecerdasan, keimanan, ketakwaan, kemuliaan akhlak, pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan keagamaan secara terpadu, serta keterampilan yang profesional.

Dengan demikian, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab yang besar terhadap kemajuan dan kecerdasan bangsanya dalam bersaing dengan bangsa lain. Kegiatan evaluasi terhadap sistem pendidikan di perguruan tinggi harus dilaksanakan secara rutin agar tujuan sistem pendidikan nasional tercapai. Produk lulusan diarahkan pada proses pencapaian hasil pendidikan, sehingga kualitas dari *output* perguruan tinggi bisa terlihat secara jelas oleh masyarakat.

Pengangguran yang berpendidikan tinggi memberikan dampak yang negatif pada stabilitas sosial-kemasyarakatan. Hal ini disebabkan penerapan sistem pembelajaran di perguruan tinggi hanya terfokus pada bagaimana menghasilkan mahasiswa yang cepat lulus dan mendapatkan pekerjaan, bukan menyiapkan lulusan

yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan secara mandiri. Kegiatan penanggulangan pengangguran terdidik mendapatkan respon yang positif, karena sebagai bentuk upaya peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi. Perbaikan sistem pendidikan di perguruan tinggi terus menerus dilakukan dengan tujuan agar mutu lulusan bisa diterima oleh dunia pasar kerja

### **Sistem Pendidikan Tinggi**

Sistem yang dimiliki oleh satuan pendidikan memiliki pengaruh terhadap kualitas lulusan yang diharapkan. Sebab, keberhasilan pendidikan menjadi tolak ukur pengembangan mutu pendidikan tinggi selanjutnya. Sosman (2015) menjelaskan beberapa tahapan pokok yang dimiliki oleh sistem pendidikan tinggi di Indonesia, yaitu:

Pertama, *input* perguruan tinggi meliputi lulusan SMA, MA, dan SMK sederajat yang mendaftarkan diri dan ikut berpartisipasi untuk memperoleh pengalaman belajar sesuai dengan bidang keilmuan yang ada. Beberapa indikator input yang baik antara lain: hasil penilaian kelulusan yang baik, *attitude* dan motivasi belajar yang positif, belajar berbasis pengalaman, dan *learning outcomes* calon mahasiswa sangat memberikan pengaruh terhadap kualitas input perguruan tinggi.

Kedua, proses. Tahapan dimana setelah mendaftarkan diri dan resmi menjadi mahasiswa, yaitu mengikuti kegiatan proses pembelajaran. Beberapa unsur yang baik dalam kegiatan proses pembelajaran meliputi: kejelasan *learning outcomes*; lingkungan yang sehat didalam organisasi; transparan dan akuntabel dalam pengelolaan PT; tersedianya bentuk dokumen kurikulum rancangan pembelajaran PT yang jelas dan berdasarkan kebutuhan pasar kerja; profesionalitas keterampilan dan *skill* SDM baik akademik dan non akademik; serta tersedianya sarana prasarana dan fasilitas yang memadai. Dengan unsur-unsur tersebut, diharapkan PT mampu mengembangkan iklim akademik yang sehat, profesional, dan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas.

Ketiga, *output*. Dengan proses pembelajaran baik dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas. Indikator-indikator yang digunakan untuk memberikan penilaian keberhasilan lulusan PT, yaitu: IPK, lama studi, dan predikat kelulusan.

Keempat, *outcomes*. Keberhasilan mutu pendidikan di perguruan tinggi terlihat dari prosentase para lulusan diterima oleh pasar kerja. Hal ini akan menjadi penilaian masyarakat terhadap kuantitas dan kualitas PT tersebut. Oleh karena itu, setiap PT harus bisa menjamin para lulusannya mampu bersaing dalam menghadapi dunia kerja dengan berbagai ilmu pengetahuan, pengalaman, dan skill yang mereka peroleh selama di dunia kampus.

### **Proses Pendidikan di Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan tinggi yang memiliki tenaga ahli dibidangnya masing-masing untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa. Chalid (2010) menjelaskan bahwa perguruan tinggi sebagai usaha agar kualitas sumber daya manusia secara sistematis menjadi meningkat. Dalam hal ini, terdapat empat pokok kebijakan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional, yaitu: pemerataan dan kesempatan, relevansi

pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan, dan efisiensi pendidikan. Pada perguruan tinggi terdapat pembahasan tentang relevansi pendidikan dengan pembangunan yang terkenal dengan sebutan *link and match* (keterkaitan dan kesepadanan). Oleh karena itu, pengembangan pengetahuan dan pembangunan harus sinergi, sehingga keberhasilan pendidikan tinggi sesuai dengan visi, misi, dan fungsinya.

Tri Dharma Perguruan Tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat) menjadi pedoman dalam pelaksanaan program *link and match*. Relevansi program dan jurusan memerlukan evaluasi yang berkesinambungan agar menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memenuhi tuntutan kegiatan perekonomian dan pembangunan bangsa. Dengan lulusan yang berkualitas, maka tujuan pembangunan bangsa dapat tercapai.

Permasalahan yang muncul dalam hal penyerapan lulusan perguruan tinggi terhadap dunia kerja terdapat dua perbedaan sudut pandang dikalangan para ahli, yaitu: pendekatan pertama, menyebutkan lulusan PT tidak mampu bekerja sesuai dengan tuntutan dunia kerja dikarenakan kurangnya *skill* yang dimiliki, dan pendekatan kedua, menyatakan lulusan PT tidak hanya disiapkan untuk siap bekerja saja, tetapi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang beriman, berakhlak mulia, cerdas, terampil, kreatif, dan mandiri. Kedua pernyataan tersebut menjadi dasar pentingnya revolusi manajemen mutu perguruan tinggi untuk tercapainya program *link and match* pada tahap pembangunan bangsa.

### **Peningkatan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi**

Dalam mempersiapkan lulusan yang berkualitas dibutuhkan peran dan tanggung jawab perguruan tinggi untuk meningkatkan mutu pendidikannya dengan tujuan mampu menghasilkan lulusan yang siap kerja dan mampu bersaing di era globalisasi. Chalid (2010) menyebutkan beberapa strategi peningkatan mutu pendidikan di perguruan tinggi, yaitu:

Pertama, mahasiswa yang dididik. Dalam hal ini, *input* sangat memberikan pengaruh terhadap *output* PT. Oleh karena itu, kegiatan penerimaan mahasiswa dilaksanakan secara selektif mungkin untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas. Target penerimaan calon mahasiswa sebaiknya harus berdasarkan pada standar mutu lulusan masing-masing fakultas. Jadi, penerimaan calon mahasiswa tidak hanya mempertimbangkan pada aspek besarnya jumlah mahasiswa dan sumber dana, sehingga kualitas lulusan yang dihasilkan tidak mampu diterima didunia pasar kerja. Pada proses pembelajaran mahasiswa tidak hanya dibekali ilmu pengetahuan, tetapi pengembangan *skill*, kedisiplinan, kemandirian, dan tanggung jawab juga harus diberikan baik melalui kegiatan perkuliahan maupun organisasi. Dengan demikian, perguruan tinggi akan menghasilkan lulusan yang berkualitas dalam berbagai bidang.

Kedua, dosen sebagai pendidik dan pengajar. Kualifikasi akademik yang dimiliki oleh masing-masing dosen menjadi pertimbangan penilaian kompetensinya. Sebab, dengan adanya dosen yang berkompeten dan berkualitas dalam bidangnya akan mampu mentransfer ilmu pengetahuan kepada mahasiswanya dengan menggunakan berbagai teknologi yang ada. Dosen juga harus memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli sebagai aspek penilaian prestasi dan prestisenya.

Peningkatan kualitas dosen terus menerus dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, meliputi; pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.

Ketiga, sarana dan prasarana. Berbagai sarana harus digunakan untuk meningkatkan mutu pendidikan diperguruan tinggi. Hubungan kerjasama yang baik dengan para mahasiswa, alumni, dan perusahaan-perusahaan harus ditingkatkan, agar lulusan yang kita miliki mampu diterima dipasar kerja. Perbaikan kurikulum dengan penambahan program-program baru dilaksanakan untuk mengembangkan *skill* mahasiswa.

Prasarana penunjang perlu ditingkatkan dengan mengikuti perkembangan teknologi yang semakin modern. Kegiatan proses pembelajaran harus didukung dengan berbagai bentuk fasilitas pendidikan yang memadai, agar lulusan mampu bersaing di era globalisasi. Dimulai dari pengembangan laboratorium, fasilitas penunjang program-program pelatihan, perpustakaan, ruang perkuliahan yang bersih, indah, nyaman, dan berbagai fasilitas pendidikan lainnya sebagai penunjang kegiatan pembelajaran baik internal maupun eksternal perguruan tinggi. Sehingga kualitas lulusan mampu memenuhi tuntutan perkembangan pasar kerja baik dalam bidang pendidikan, jasa, dan industri.

### **Pentingnya Mempersiapkan Lulusan Perguruan Tinggi dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)**

Pendidikan memiliki peranan yang sangat signifikan dalam menghasilkan sumber daya manusia yang berkompeten. Pengembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan pada masing-masing bidang memberikan pengaruh positif terhadap produktifitas. Tetapi, permasalahan baru akan muncul apabila ketersediaan lapangan pekerjaan tidak ada kesinambungan dengan peningkatan mutu pendidikan. Akhirnya, banyak sarjana yang pengangguran akibat dari keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Idris (2016) menyebutkan bahwa dalam setiap tahunnya lulusan perguruan tinggi bertambah banyak, namun kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia memberikan dampak negatif terhadap peluang pekerjaan yang tidak sesuai bidang keahliannya dengan sebuah pertimbangan dari pada menganggur.

Hal tersebut menunjukkan bahwa keterpurukan perekonomian yang berkepanjangan ini bukan karena rendahnya SDM sehingga tidak mampu menghadapi persaingan global. Chintya (2016) menjelaskan permasalahan SDM inilah yang menjadi penyebab produktifitas tenaga kerja kurang memberikan dukungan terhadap proses pembangunan yang berjalan selama ini. Oleh karena itu, sekarang ini sudah waktunya bangsa Indonesia untuk memanfaatkan SDM dan SDA yang dalam membangun perekonomian nasional tanpa menggunakan kekuatan asing.

Andriyani (2015), menjelaskan bahwa dalam meraih kemenangan di era MEA, maka *skill* dan keterampilan harus dimiliki oleh para lulusan perguruan tinggi sesuai dengan bidangnya untuk menjadi tenaga kerja yang terampil (*skilled labour*). Adanya MEA memberikan kesempatan bekerja yang seluas-luasnya bagi semua warga negara ASEAN, sehingga tidak ada hambatan untuk mendapatkan perkerjaan yang diinginkan.

Dalam menghadapi era MEA, peningkatan mutu lulusan pendidikan tinggi harus mengarah pada standar mutu pendidikan internasional. Sehingga lulusan PT tidak hanya berbasis siap kerja, akan tetapi mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi persaingan di era globalisasi. Jadi, bagi masing-masing perguruan tinggi harus mampu bersaing dengan perguruan tinggi luar negeri.

### **Penanggulangan Pengangguran Terdidik**

Pemerintah telah melakukan beberapa bentuk kegiatan dalam upaya mengurangi jumlah pengangguran yang ada, meliputi; memberikan kesempatan kerja yang luas, pengiriman tenaga kerja Indonesia, dan transmigrasi. Akan tetapi, munculnya pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh perusahaan-perusahaan juga semakin meningkatkan dampak dari pengaruh pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Dengan demikian, persoalan baru tentang pengangguran terdidik muncul kembali. Hasan (2010) memberikan penjelasan seharusnya tidak ada pengangguran jika melihat seorang sarjana yang telah dibekali ilmu pengetahuan yang luas, memiliki jiwa kewirausahaan yang profesionalitas, dan jiwa kepemimpinan yang matang.

Angka pengangguran sebagian besar dari para lulusan perguruan tinggi, akibat dari kurangnya motivasi lulusan untuk menciptakan lapangan kerja secara mandiri dengan skill yang sudah mereka miliki. Tingkat kesejahteraan daerah sangat dipengaruhi oleh tingkat pengangguran yang ada. Maka dari itu, diperlukan renovasi yang besar dalam menangani masalah pengangguran yang tahun, semakin bertambah.

Hasan (2010) memberikan beberapa tahapan yang harus dilakukan oleh *stakeholder* (pemerintah, pihak perguruan tinggi, pengusaha, mahasiswa) dalam mengatasi pengangguran terdidik, yaitu: 1) melakukan pemetaan antara prediksi kebutuhan tenaga kerja di lapangan dengan dunia pendidikan kampus melalui program-program studi yang ada, dan 2) mahasiswa perlu dibekali dengan pengembangan *softskill*.

Dampak buruk pengangguran terhadap dunia pendidikan disebabkan banyaknya lulusan perguruan tinggi yang tidak mampu mengikuti perkembangan zaman. Selain itu, juga karena ketersediaan lapangan pekerjaan belum mampu memenuhi jumlah lulusan yang setiap tahun semakin meningkat. Namun, hanya dengan semangat dan kesadaran berwirausaha yang tumbuh dari masing-masing individu lulusan untuk bisa menciptakan lapangan kerja sendiri akan mampu mengatasi permasalahan pengangguran terdidik yang ada.

### **KESIMPULAN**

Perguruan tinggi sebagai sebuah lembaga pendidikan yang memiliki tanggung jawab besar terhadap kecerdasan bangsa agar mampu bersaing dalam menghadapi dunia globalisasi. Oleh karena itu, masing-masing perguruan tinggi harus melakukan berbagai terobosan baru untuk menghasilkan lulusan yang memiliki bidang keahlian sesuai dengan tuntutan dunia kerja pada masa sekarang. Perbaikan pengembangan sistem pendidikan perguruan tinggi terus diupayakan dalam berbagai aspek, dimulai dari *input*, *proses*, *output*, dan *outcomes*.

Maka pada era MEA ini, para pengelola perguruan tinggi mendorong berbagai upaya peningkatan untuk kualifikasi pendidikan tenaga dosen ke jenjang lanjutan S2

dan S3, dengan harapan mutu pendidikan tinggi bisa tercapai secara maksimal. Oleh karena itu, pemerintah, dunia usaha/ industri, dan pengelola pendidikan harus bersinergi dalam pemberian perhatian pada bentuk-bentuk kegiatan kerjasama yang dapat meningkatkan sumber daya perguruan tinggi. Dengan orientasi bahwa perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang mencari kerja (*what to do*), tetapi lulusan yang mampu menciptakan usaha mandiri (*what to be*).

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alba, C. 2011. *Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi*. Jurnal Socioteknologi, Institut Teknologi Bandung, Vol. 10, No. 24, Tahun 2011, hal. 1184-1190.
- Andriani, C. 2015. *Mahasiswa dan Perguruan Tinggi dalam Era ASEAN Economic Community*. Prosiding Seminar Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (SNEMA), Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. ISBN. 978-602-17129-5-5, hal. 284-290.
- Chintya, A. 2016. *Peningkatan Kualitas Pendidikan di Perguruan Tinggi Melalui Total Quality Management (TQM) dalam Menyongsong Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)*. Jurnal RI'AYAH, Jurnal Sosial dan Keagamaan, IAIN Metro Lampung, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hal. 72-87.
- Chalid, S. 2010. *Peningkatan Mutu Pendidikan di Perguruan Tinggi*. Prosiding APTEKINDO: Seminar Internasional Peran LPTK dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi di Indonesia, Fakultas Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Ganesha, ISSN. 1907-2066, hal. 115-120.
- Hasan, M, A. 2010. *Mengatasi Sarjana Pengangguran*. (Online), <https://ahmadmakki.wordpress.com/2010/07/20/mengatasi-sarjana-pengangguran/>, diakses 15 Agustus 2019.
- Idris, A. 2016. *Pengantar Eknomi Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Marlimawati, R. 2016. *Rektor Asing dalam Pendidikan Tinggi*. (Online), <https://rmol.id/read/2016/06/21/250642/>, diakses 20 Juli 2019.
- Sosman, A. 2015. *Sistem Pendidikan Tinggi Indonesia*. (Online), <http://id.unizar.ac.id/sistem-pendidikan-tinggi-indonesia/>, diakses 20 Juli 2019.
- Suyanto, B, dan Ariadi, S. 2013. *Penanganan Pengangguran Terdidik di Jawa Timur*. Jurnal Masyarakat, Kebudayaan dan Politik, Departemen Sosiologi, FISIP, Universitas Airlangga Surabaya, Vol. 26, No. 4, hal. 257-264.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.*
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.*
- Undang-undang Badan Hukum Pendidikan Tahun 2008.*